



KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. SE, M. Eng.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB



Disampaikan pada Rapat Koordinasi Instansi Pembina Jabatan Fungsional
Jakarta, 13 Mei 2014

OUTLINE PRESENTASI

1. LATAR BELAKANG

2. *ROADMAP* MANAJEMEN ASN

3. KEBIJAKAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN
JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN)

4. PENUTUP



Deputi
SDM
APARATUR
Kemenpan RB

1

LATAR BELAKANG

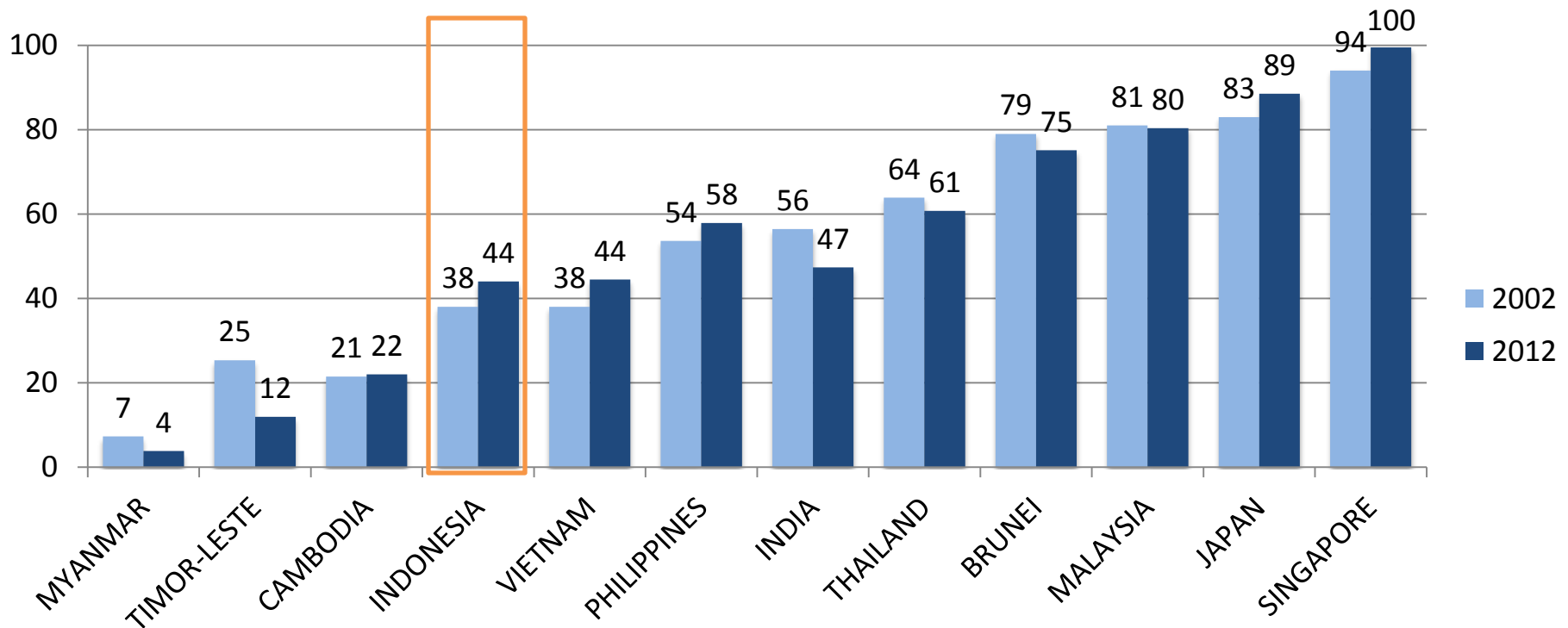
Worldwide Governance Indicators

Government Effectiveness

- Kualitas Pelayanan Publik
- Kualitas Pelayanan Aparatur
- Tingkat Kemandirian dari Tekanan Politik
- Kualitas Rumusan Kebijakan dan Implementasinya
- Kredibilitas komitmen pemerintah

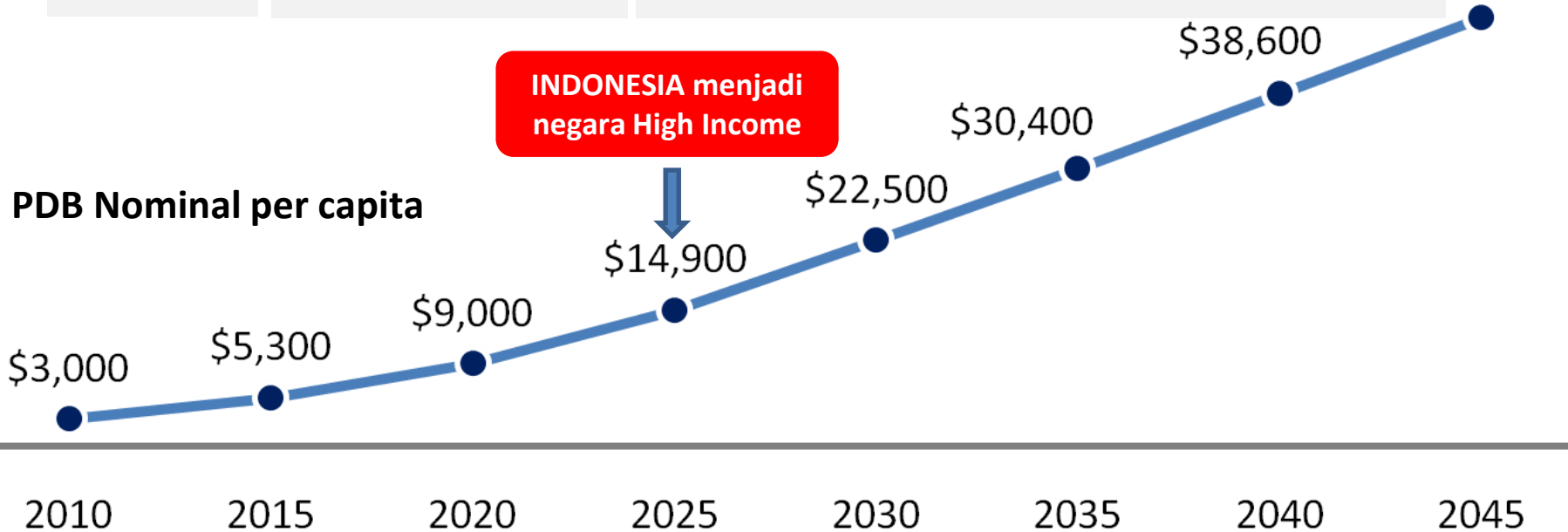
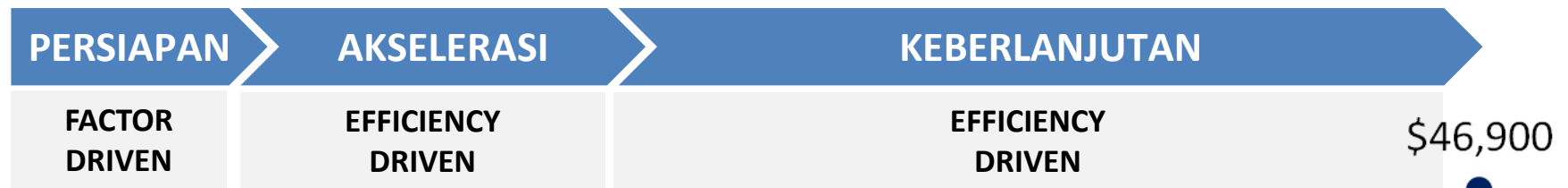


© 2013



Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)

TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA



PDB NOMINAL (US\$ MILIAR)

711	1,335	2,416	4,257	6,793	9,706	12,989	16,578
-----	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

POPULASI (JUTA JIWA)

237	253	269	286	302	319	336	353
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

"IN MEMORIAM" THEE KIAN WIE

Birokrasi Hambat Kemajuan Ekonomi dan Peneliti

Oleh CARUNIA MULYA FIRDAUSY

Salah satu pakar sejarah ekonomi Indonesia, Thee Kian Wie, PhD, kini telah tiada.

Kepergiannya pada Sabtu (6/2) pagi sangat mengejutkan banyak kolega, baik para ekonom maupun non-ekonom dalam dan luar negeri. Pasalnya, Thee Kian Wie merupakan pribadi yang dinamis dan enerjik serta humoris walaupun di usianya yang hampir mencapai angka 80 tahun. Bincang-bincang singkat saya dengan Thee Kian Wie pada Jumat (7/2) pukul 16.30 di Pusat Penelitian Ekonomi LIPI rupanya perjumpaan yang terakhir.

Saya mengenal Pak Thee (gungilan saya kepada beliau) lebih dari 30 tahun sejak saya memaparkan kaldi pada 1982 sebagai pegawai negeri sipil di Lembaga Sosial-Ekonomi Nasional (Lekes-LIPI). Lembaga ini kini tidak dikenal lagi. Bersama dengan Lembaga Riset Kebudayaan Nasional (LIRKN), karena alasan restrukturisasi, LIPI meleburnya menjadi lima pusat penelitian pada 1983, yaitu Pusat Penelitian Ekonomi, Pusat Penelitian Kependudukan, Pusat Penelitian Politik, Pusat Penelitian Ekonomi dan Pembangunan yang pertama dan kini diubah lagi menjadi Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Lantas, siapakah Thee Kian Wie itu dan bagaimana pemikirannya dengan ekonomi Indonesia?

Benar bahwa perhatian Thee Kian Wie sebagai sosok ekonom lulusan University of Wisconsin,

Madison, Amerika Serikat, memang banyak dicurahkan pada penelitian sejarah ekonomi dan perkembangan industri nasional. Namun, itu tidak berarti Thee Kian Wie tidak memiliki perhatian pada isu ekonomi lainnya, seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, investasi, dan isu ekonomi pembangunan lain.

Bahkan, perhatian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan nasional pun tidak luput dari perhatian beliau. Halaman opini ini saya yakin tidak akan cukup untuk memuatkan karya-karya penelitian yang dilakukan Thee Kian Wie selama hidupnya. Buku yang terakhir ditulainya, yakni *Indonesia's Economy Since Independence*, dipublikasikan oleh Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapura, tahun 2002. Belum lagi pikiran-pikirannya di media surat kabar ataupun jurnal ilmiah nasional dan internasional.

Jalan di tempat

Dari sekian banyak pikiran ataupun karya tertulis hasil penelitian yang dilakukan Thee Kian

Wie, yang telah diterbitkan, **hambatnya pembangunan ekonomi nasional selama ini disebabkan adanya birokrasi yang menghambat. Akibatnya, berbagai kebijakan baik dari moneter ataupun kebijakan ekonomi lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jalan di tempat.**

Layaknya *noller counter* yang berputar, tetapi berputar di lintasan yang sama. Sebut saja di bidang investasi, sektor ini naik-turun peningkatannya karena komitmen untuk memajukan berbagai ketidakberesan dalam perizinan, pengelolaan lahan, dan korupsi, kolusi dan nepotisme masih menggarita. Akibatnya, investasi domestik dan asing enggan masuk ke Indonesia. Ujung-

nya, upaya untuk membuat perekonomian naik kelas dari struktur ekonomi berbasis pertanian menjadi basis industri semakin jauh dari yang diharapkan.

Hal lain yang juga penting disebutkan ialah pikirannya dalam upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Thee Kian Wie pada prinsipnya berpendapat bahwa *growth is necessary to eliminate the incidence of poverty*. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut harus pula diikuti dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara langsung tanpa hambatan birokrasi.

Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi, menurut Thee, jalan keluar meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat miskin. *However*, menurut dia, jika perhatian pada komitmen penghilangan rantai birokrasi dalam merombong ekonomi nasional tidak dilakukan pemerintah,

Saya meyakini masih banyak lagi pikiran besar lain yang telah dikonstruksikan oleh seorang Thee Kian Wie dari hasil-hasil penelitian selama hidupnya untuk berbagi membangun perekonomian bangsa ini. Jika Pak

Thee seorang *strong manager*, berbagai masalah pasti ya dapatkan. Syukurilah beliau bukan seorang yang suka merendahkan atau menghitung-hitung hasil kerjanya. Dengan kesederhanaan yang dimiliki, kepala peneliti khususnya di Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Pak Thee selalu berpesan untuk menjadi peneliti yang tetap profesional di tengah-tengah kondisi birokrasi yang semakin tidak profesional di lingkungan penelitian. Selamat jalan Pak Thee.

CARUNIA MULYA
FIRDAUSY

Profesor Riset LIPI dan
Guru Besar Ekonomi Utara

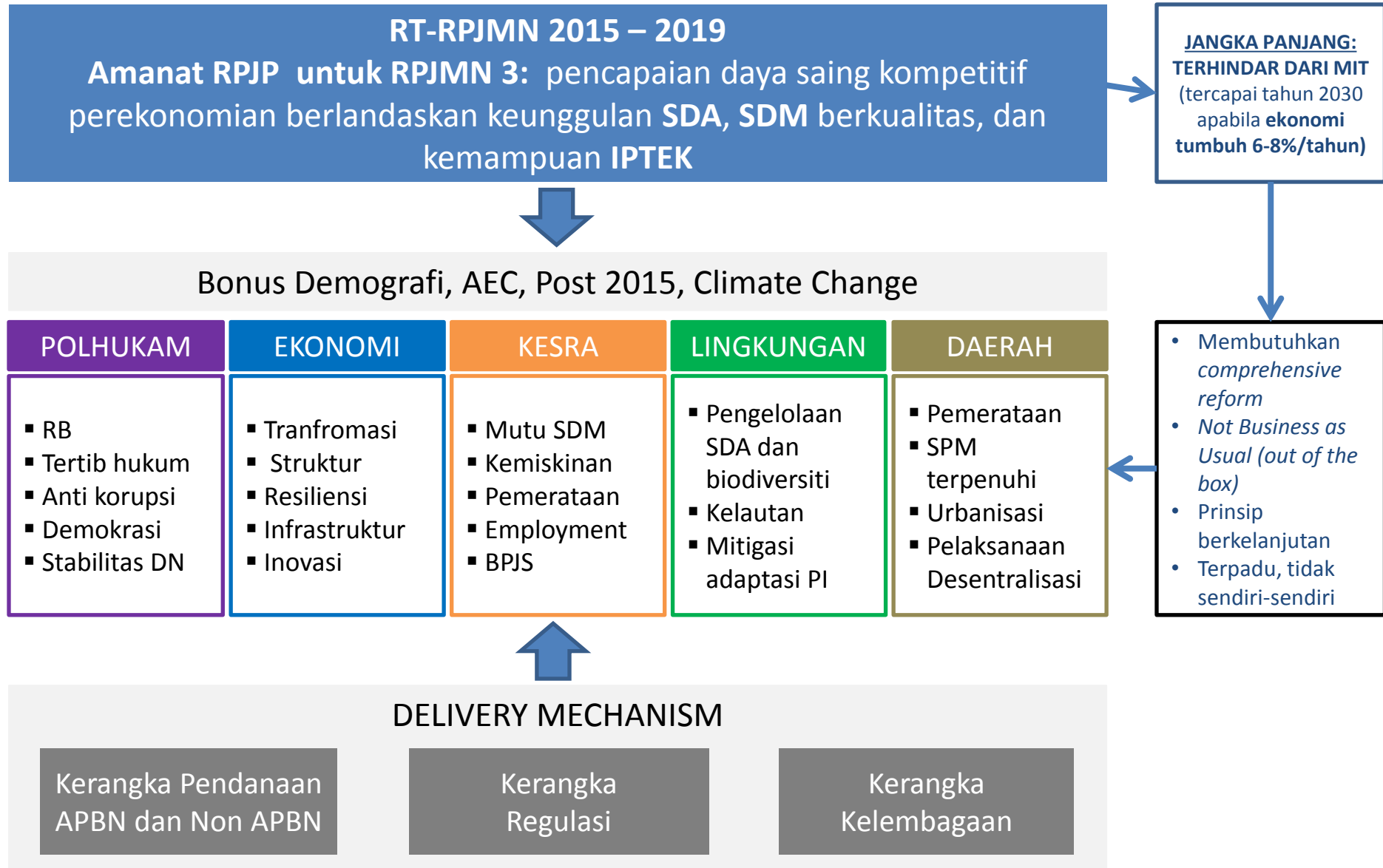
IN MEMORIAM THEE KIAN WIE

“...pertumbuhan ekonomi harus diikuti kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara langsung tanpa hambatan birokrasi”

“...lambatnya pembangunan ekonomi nasional selama ini disebabkan adanya birokrasi yang menghambat”

KERANGKA RANCANGAN TEKNOKRATIS (RT) RPJMN 2015 – 2019

MENGUATKAN LANDASAN UNTUK KELUAR DARI MIDDLE INCOME TRAP (MIT)



PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA

Jumlah Pegawai ASN: 4,36 juta

- Pusat : 891.509
- Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013)

Jumlah Penduduk: 247 Juta

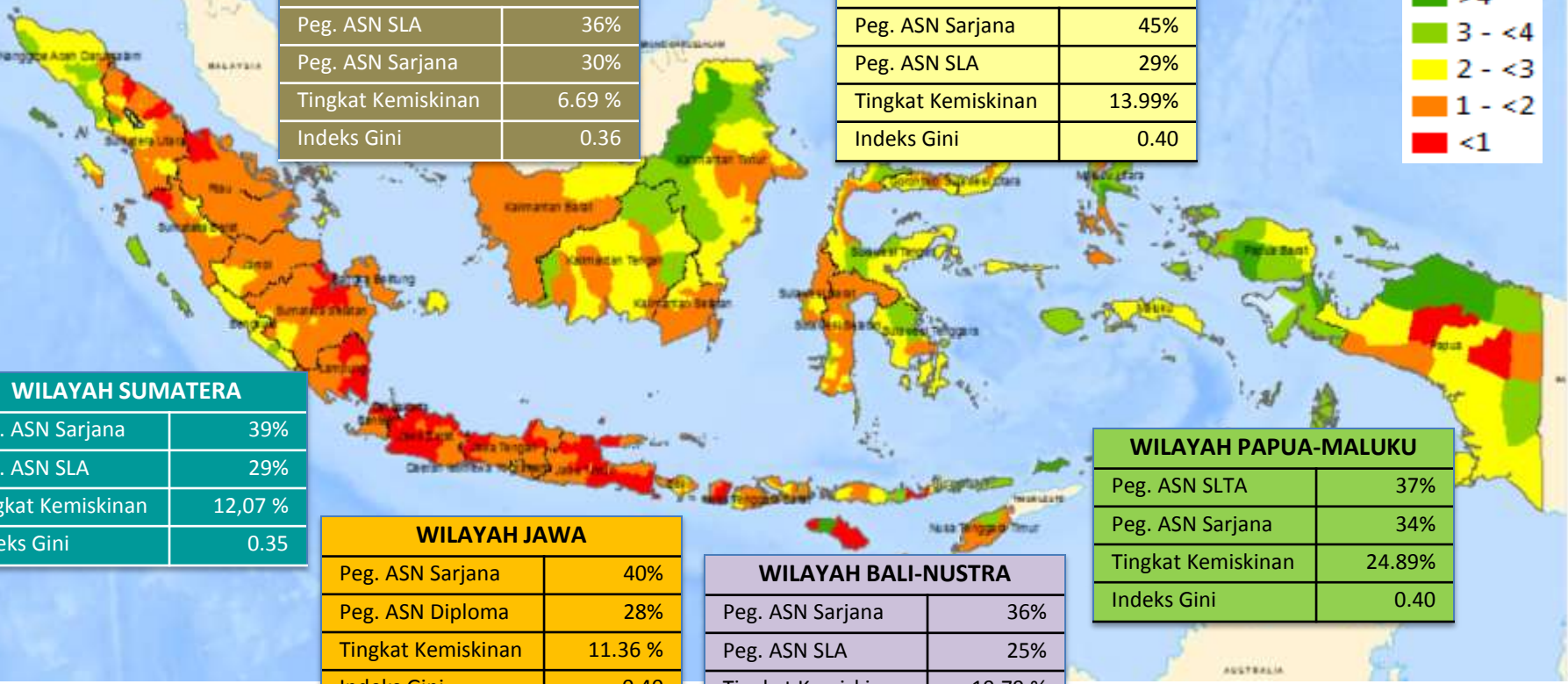
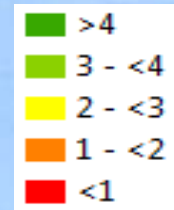
(Data Induk Depdagri 2013)

Rasio Pegawai ASN: 1,76%

RASIO PEGAWAI ASN KAB/KOTA PER 100 PENDUDUK

WILAYAH KALIMANTAN	
Peg. ASN SLA	36%
Peg. ASN Sarjana	30%
Tingkat Kemiskinan	6.69 %
Indeks Gini	0.36

WILAYAH SULAWESI	
Peg. ASN Sarjana	45%
Peg. ASN SLA	29%
Tingkat Kemiskinan	13.99%
Indeks Gini	0.40



WILAYAH SUMATERA	
Peg. ASN Sarjana	39%
Peg. ASN SLA	29%
Tingkat Kemiskinan	12,07 %
Indeks Gini	0.35

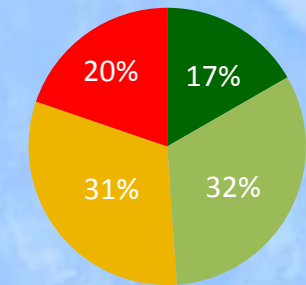
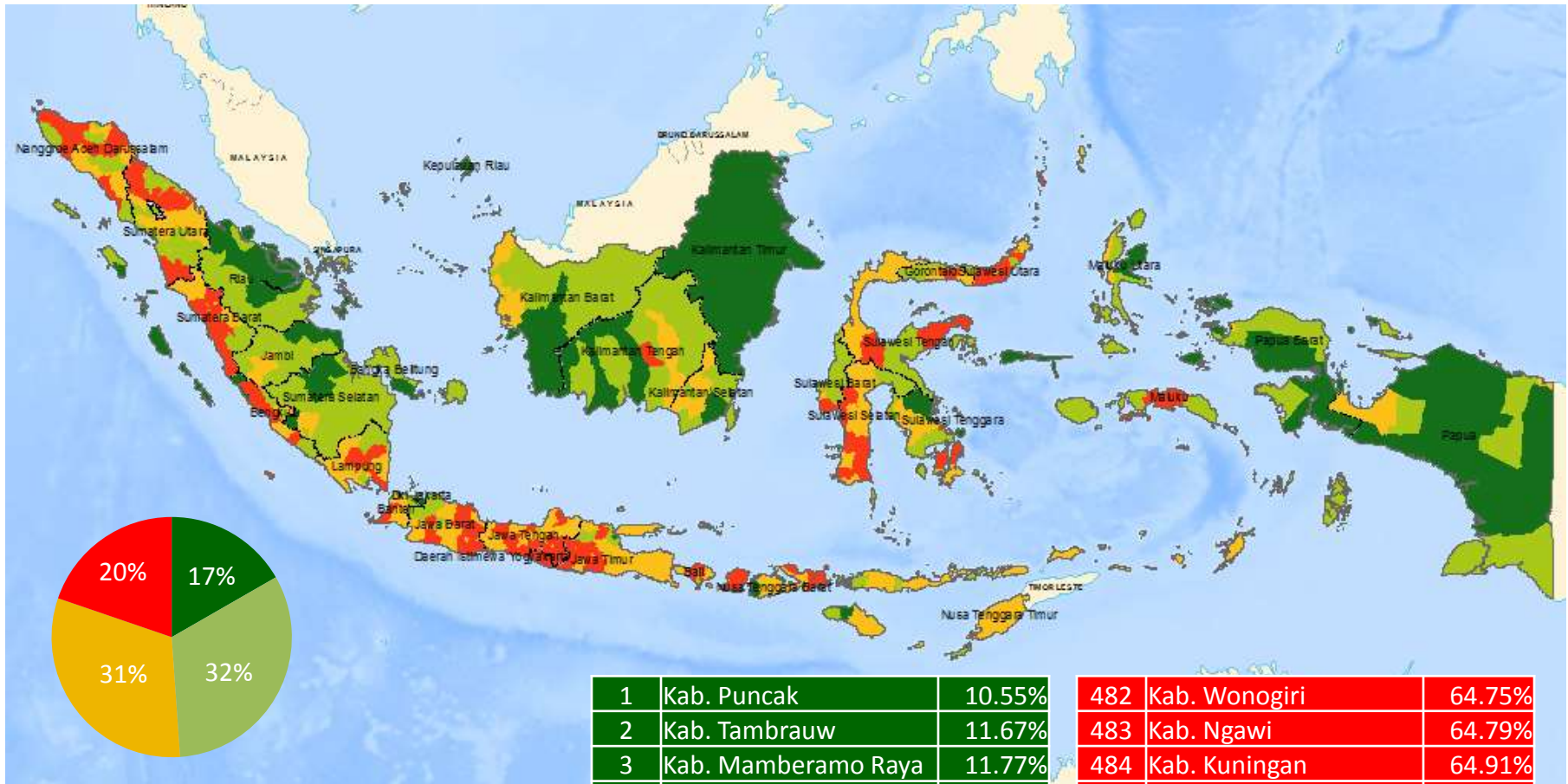
WILAYAH JAWA	
Peg. ASN Sarjana	40%
Peg. ASN Diploma	28%
Tingkat Kemiskinan	11.36 %
Indeks Gini	0.40

WILAYAH BALI-NUSTRA	
Peg. ASN Sarjana	36%
Peg. ASN SLA	25%
Tingkat Kemiskinan	19.79 %
Indeks Gini	0.38

WILAYAH PAPUA-MALUKU	
Peg. ASN SLTA	37%
Peg. ASN Sarjana	34%
Tingkat Kemiskinan	24.89%
Indeks Gini	0.40

RASIO BELANJA PEGAWAI PADA APBD **KABUPATEN/KOTA** 2013

Memperhitungkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) & Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL)



■ < 31% : 82 Kab/Kota
■ 31 - 46% : 158 Kab/Kota
■ 46 - 56% : 154 Kab/Kota
■ > 56% : 97 Kab/Kota

1	Kab. Puncak	10.55%
2	Kab. Tandrauw	11.67%
3	Kab. Mamberamo Raya	11.77%
4	Kab. Tana Tidung	12.88%
5	Kab. Malinau	14.20%
6	Kab. Teluk Bintuni	14.80%
7	Kab. Natuna	16.56%
8	Kab. Kutai Barat	17.50%
9	Kab. Kaimana	17.52%
10	Kab. Mamberamo Tengah	17.72%

482	Kab. Wonogiri	64.75%
483	Kab. Ngawi	64.79%
484	Kab. Kuningan	64.91%
485	Kab. Purworejo	65.07%
486	Kab. Sragen	66.92%
487	Kab. Minahasa	67.97%
488	Kab. Karanganyar	68.10%
489	Kab. Klaten	68.51%
490	Kab. Simalungun	70.34%
491	Kota Ambon	71.51%

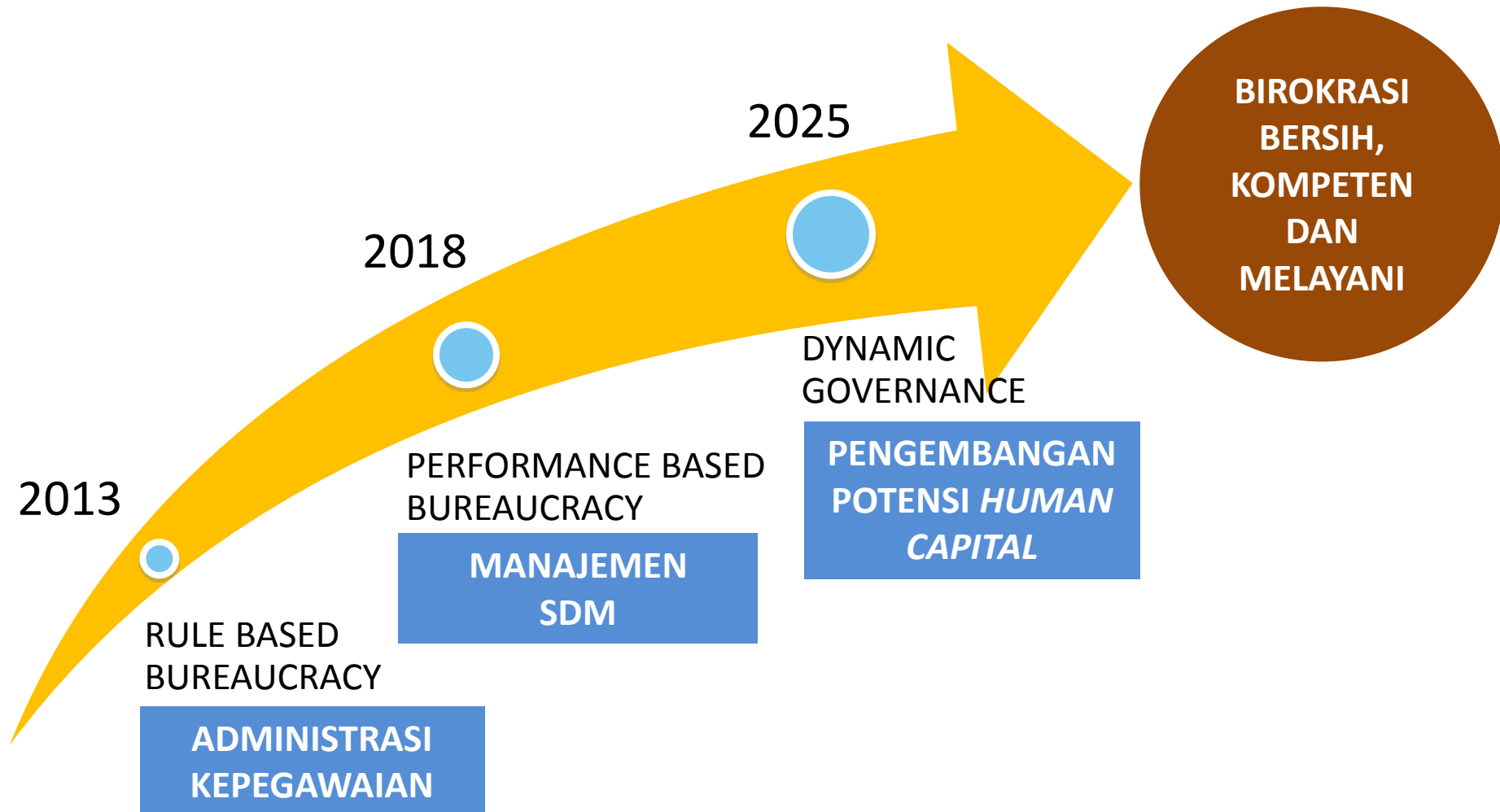


Deputi
SDM
APARATUR
Kemenpan RB

2

ROADMAP
MANAJEMEN ASN

TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGLOLAAN SDM APARATUR



PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013



Penyerahan RUU ASN Setelah Disahkan DPR

UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN

TGL 15 JANUARI 2014



PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

(Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014)

- 1** PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI
- 2** PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS
- 3** SISTEM SELEKSI CPNS & PROMOSI PNS SECARA TERBUKA
- 4** PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS
- 5** PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH
- 6** PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA
- 7** PENINGKATAN TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS APARATUR
- 8** PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI
- 9** PENINGKATAN EFISIENSI BELANJA APARATUR

PROGRAM PERCEPATAN JF

9

Program Percepatan Reformasi
Birokrasi

RENCANA AKSI

a. Penetapan standar kompetensi jabatan

b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat)

c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi

d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri

e. Sertifikasi kompetensi profesi

f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara perodik

g. Pengukuran Kinerja Individu

h. Penguatan Jabatan Fungsional

Identifikasi jabatan fungsional

Identifikasi output jabatan fungsional

Penyusunan standar kompetensi

Pengelolaan kinerja jabatan fungsional

Penyesuaian tunjangan jabatan fungsional

PROGRAM



Profesionalisasi
PNS





Deputi
SDM
APARATUR
Kemenpan RB

3

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

JABATAN ASN

DIISI DARI PEGAWAI ASN

Jabatan Administrasi

Jabatan Administrator (setara eselon III) memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Jabatan Pengawas (setara eselon IV) mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

Jabatan Pelaksana (setara Eselon V atau JF Umum) melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan

Jabatan Fungsional

Jafung keahlian: a) ahli utama;
b) ahli madya;
c) ahli muda; dan
d) ahli pertama.

Jafung keterampilan: a) penyelia;
b) mahir;
c) terampil; dan
d) pemula

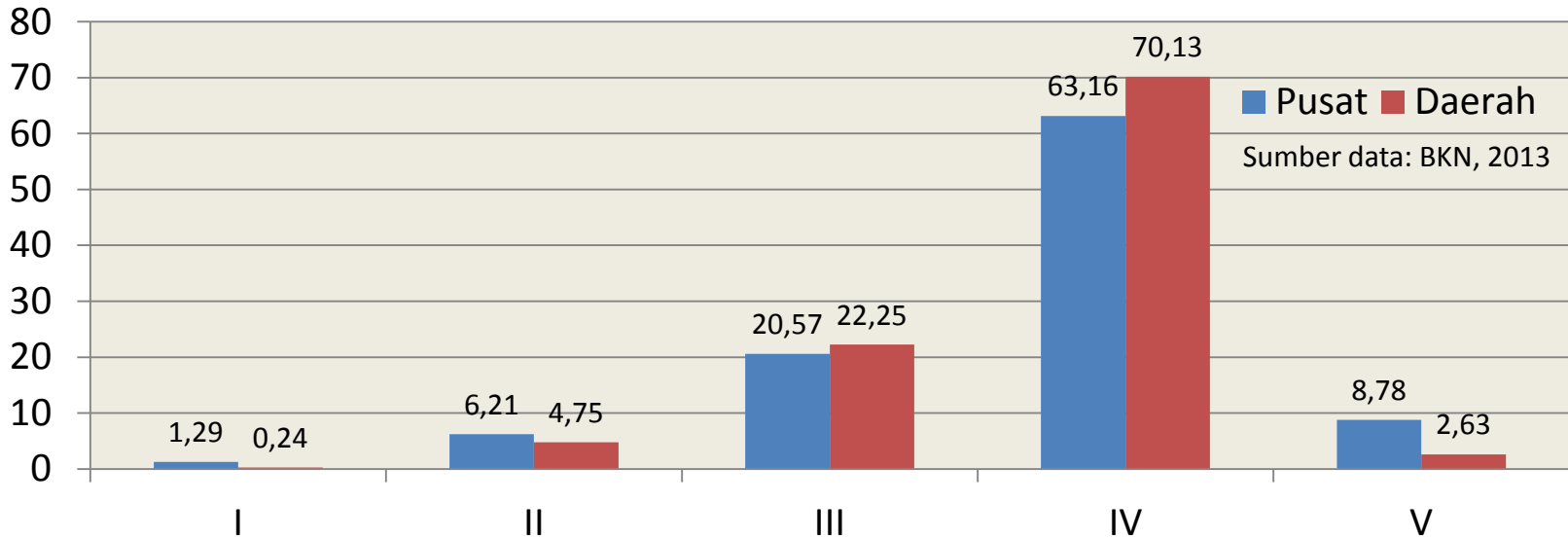
Jabatan Pimpinan Tinggi

- Jabatan pimpinan tinggi utama (**setara Eselon I**);
- Jabatan pimpinan tinggi madya (**setara eselon I**); dan
- Jabatan pimpinan tinggi pratama (**setara eselon II**).

DIISI TNI
DAN POLRI

Jabatan ASN tertentu

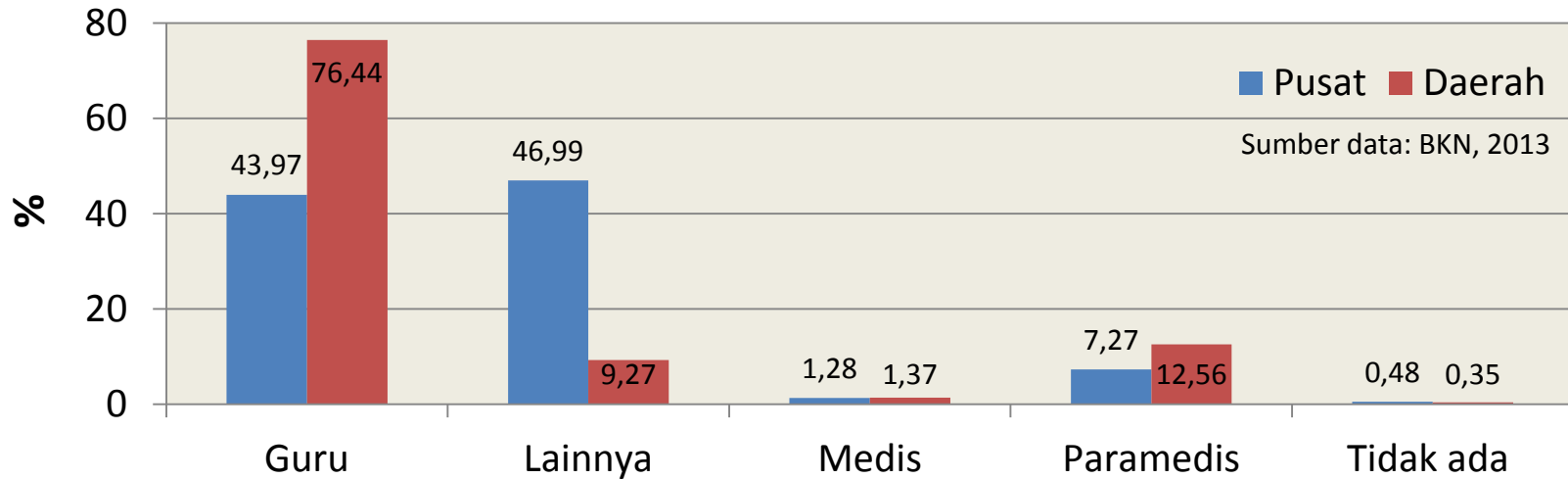
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL



ESELON	PUSAT	DAERAH	TUNJANGAN (milyar rupiah/BLN)
I	629	34	3,6
II	3.031	13.194	52,7
III	10.049	61.810	90,5
IV	30.850	19.4782	121,8
V	4.288	7.297	4,1
	TOTAL		272,7



JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL



Persentasi Jabatan Fungsional terhadap Jumlah Pegawai

- Pusat 35,3%
- Daerah 53,4% (dominasi fungsional umum)

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

43
INSTANSI
PEMBINA JF T

JABATAN
FUNGSIONAL

TERAMPIL

AHLI

2012

110

2013

124

2014 +
POTENSI

106

+

134

ESTIMASI 2014

240

2014: 5 JFT BARU = 129

KONDISI JABATAN FUNGSIONAL SAAT INI

1 Jumlah JF yg sudah ditetapkan 129

2 Kelemahan dalam pengaturan

JF terampil dan ahli digabung



- BUP dan tunjangan disamakan
- Pembebanan keuangan negara yg tidak tepat sasaran

kegiatan berdasarkan proses dan produk/output tidak terdefinisi



A.K yg dikumpulkan tidak mencerminkan prestasi kerja JF

Belum terdefinisinya standar kompetensi jabatan



- Pengembangan kompetensi JF tidak optimal
- diklat JF belum dapat didesain secara optimal

Persyaratan pengangkatan dalam JF tidak berdasarkan uji kompetensi



JF menjadi jabatan alternatif (tempat penampungan)

KONDISI JABATAN FUNGSIONAL KEDEPAN

1

Pemisahan JF Ahli dan JF Terampil secara bertahap

- Sesuai dengan standar jabatan internasional
- Jumlah JF dari 129 menjadi 240

2

Potensi Usulan JF baru pada 76 K/L : 152 JF terampil dan ahli

3

Penyempurnaan dalam pengaturan

kegiatan tidak berdasarkan proses tetapi berdasarkan produk/output akhir



Prestasi kerja JF lebih terukur

Menyusun standar kompetensi JF



- Pengelolaan kompetensi JF dapat berjalan secara efektif
- Terwujudnya kelas jabatan
- diklat JF dapat direncanakan berdasarkan training need assessment (TNA)

Persyaratan pengangkatan dalam JF berdasarkan uji kompetensi



- Peningkatan profesionalisme dapat dilakukan
- JF menjadi pilihan karier

Mengharuskan instansi pembina JF untuk melakukan pengelolaan JF secara profesional

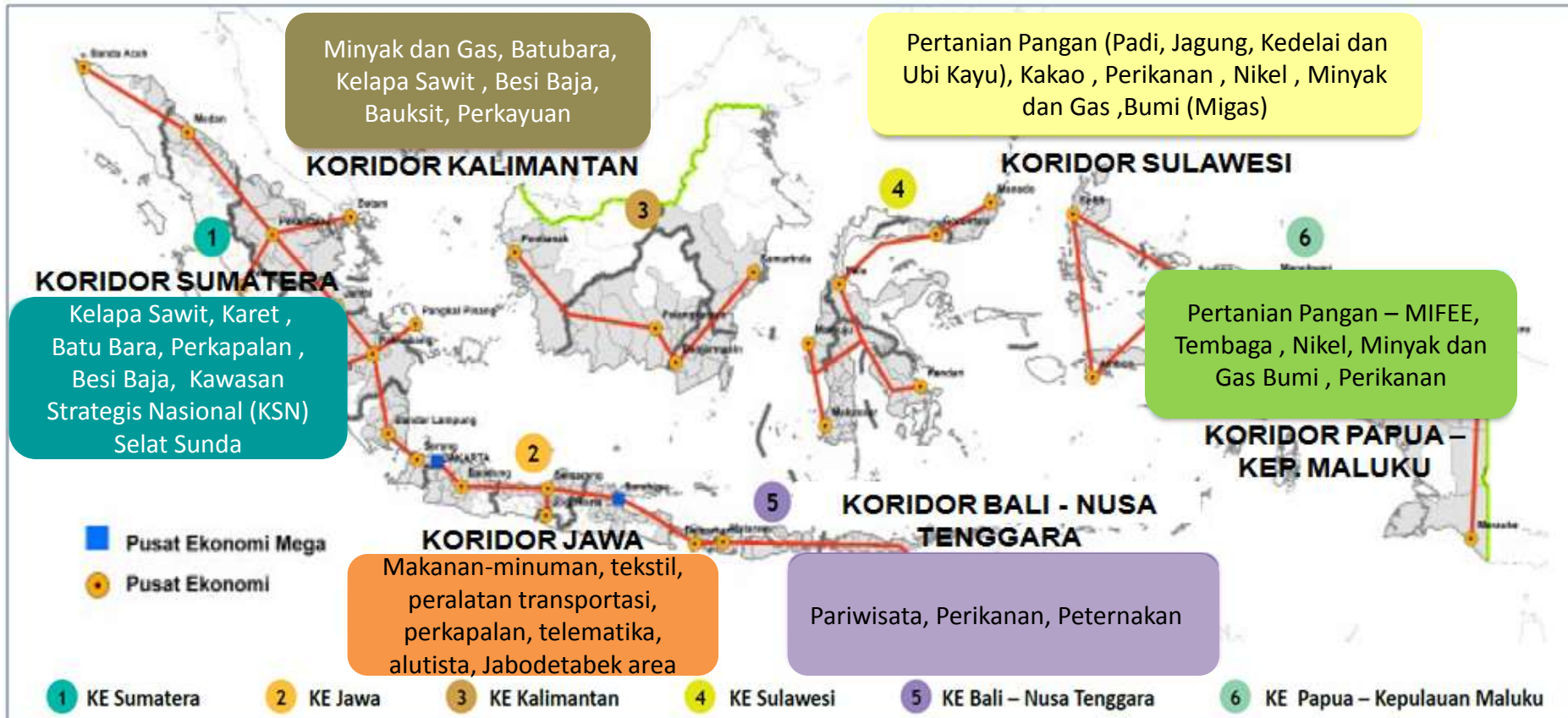


Pengelolaan profesionalisme JF dapat dilakukan

SIMULASI PERENCANAAN
KEBUTUHAN SDM JFT DENGAN
KESESUAIAN RENCANA
PEMBANGUNAN NASIONAL
2015-2019

KEBUTUHAN JUMLAH & JENIS PEGAWAI ASN SEPENUHNYA MENUNJANG ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL

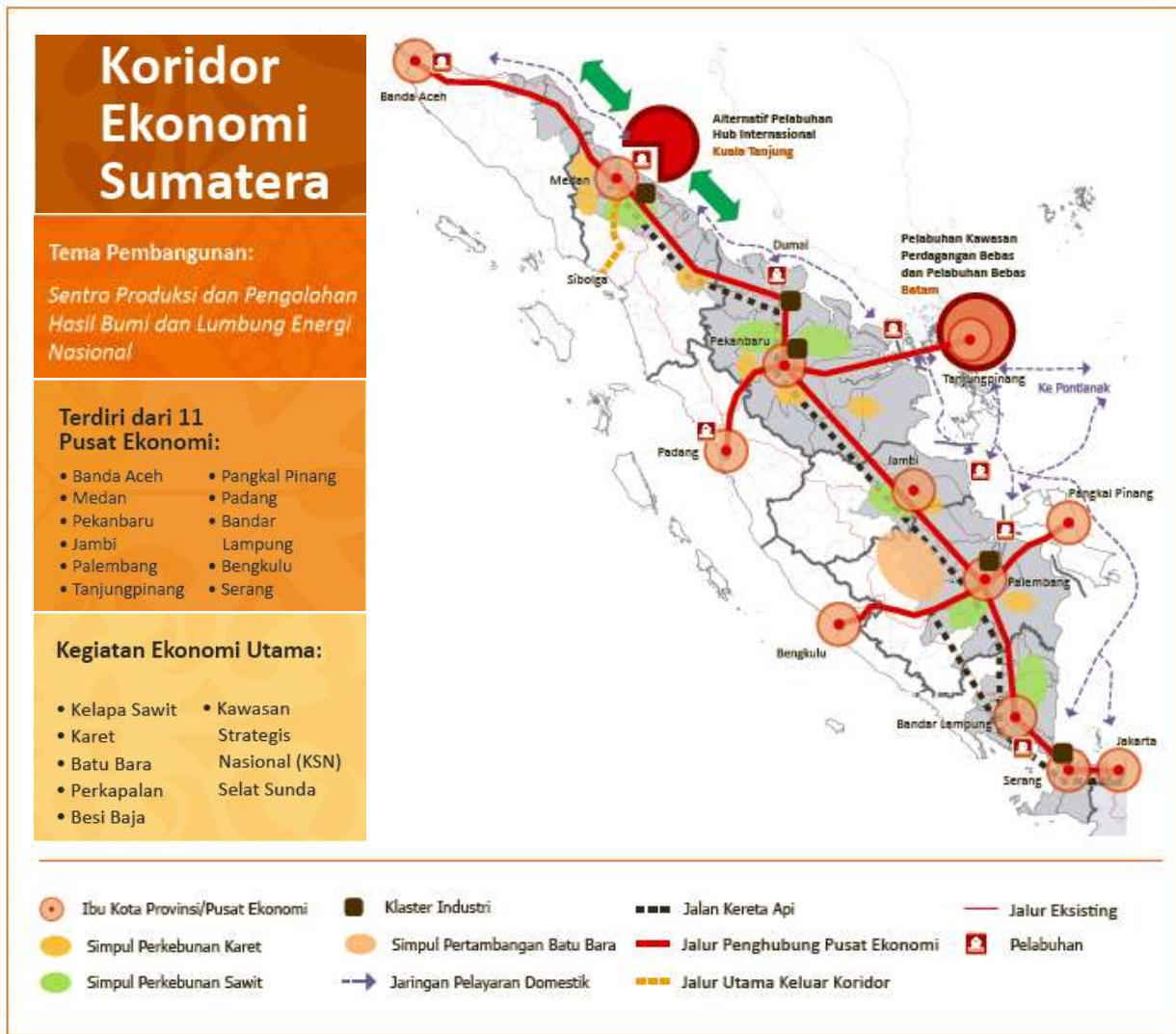
CONTOH: KORIDOR EKONOMI MP3EI DAN KEGIATAN UTAMANYA



PERLU ADANYA INTERKONEKSI ANTARA MP3EI DENGAN MANAJEMEN SDM APARATUR:

- PERLU ROADMAP PENGEMBANGAN SDM APARATUR UNTUK Mendukung MP3EI
- PERLU PERENCANAAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN PEGAWAI SERTA KEBIJAKAN MUTASI DAN ROTASI PEGAWAI (ANTAR DAERAH)

CONTOH KORIDOR EKONOMI SUMATERA



MEMERLUKAN SDM APARATUR DGN KUALIFIKASI

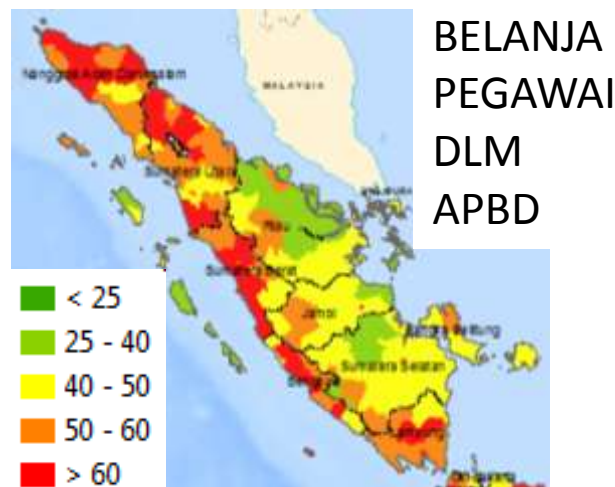
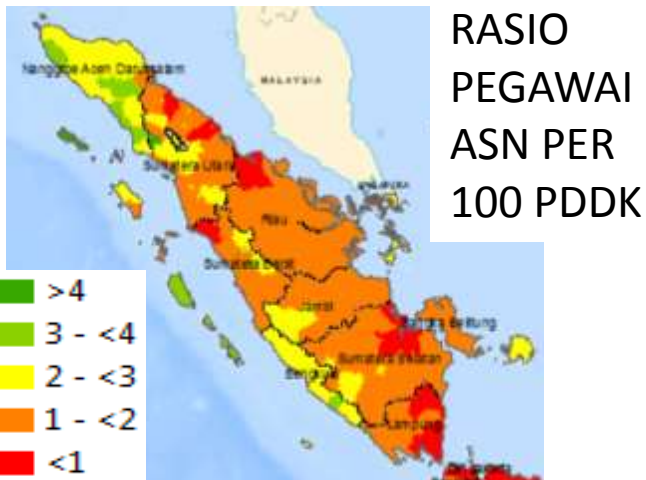
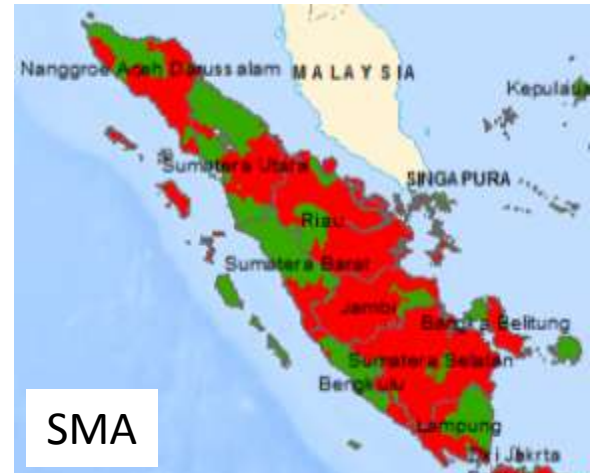
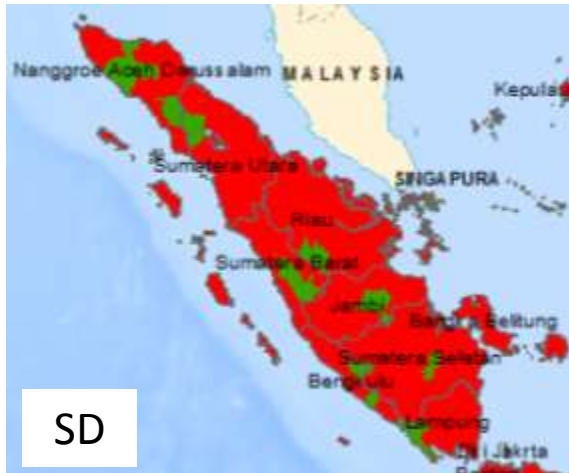
Sarjana/Master:

- Pertanian
- Perkebunan
- Pertambangan
- Perminyakan
- Geologi
- Elektro
- Mesin
- Managemen SDA
- Lingkungan
- Ekonomi
- Perencanaan Wil.
- Transportasi
- Sipil
- Hub. Internasional
- *Public Relation*
- dll.

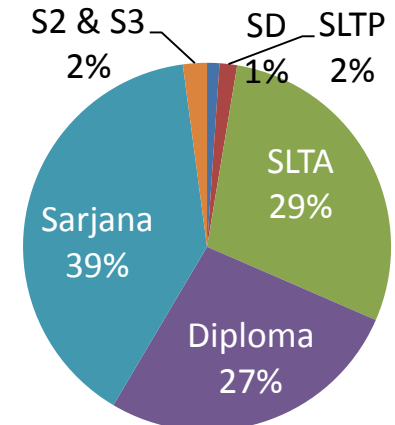
KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI SUMATERA

KETERSEDIAAN GURU

■ Kelebihan Guru
■ Kekurangan Guru



PENDIDIKAN PEG. ASN



KORIDOR EKONOMI PAPUA MALUKU

Koridor Ekonomi Papua – Kepulauan Maluku

Tema Pembangunan:

Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional.

Terdiri dari 7 Pusat Ekonomi:

- Sofifi
- Ambon
- Sorong
- Manokwari
- Timika
- Jayapura
- Merauke

Kegiatan Ekonomi Utama:

- Pertanian Pangan - MIFEE
- Tembaga
- Nikel
- Minyak dan Gas Bumi
- Perikanan

KEBUTUHAN SDM APARATUR

KEGIATAN EKONOMI PERTANIAN PANGAN

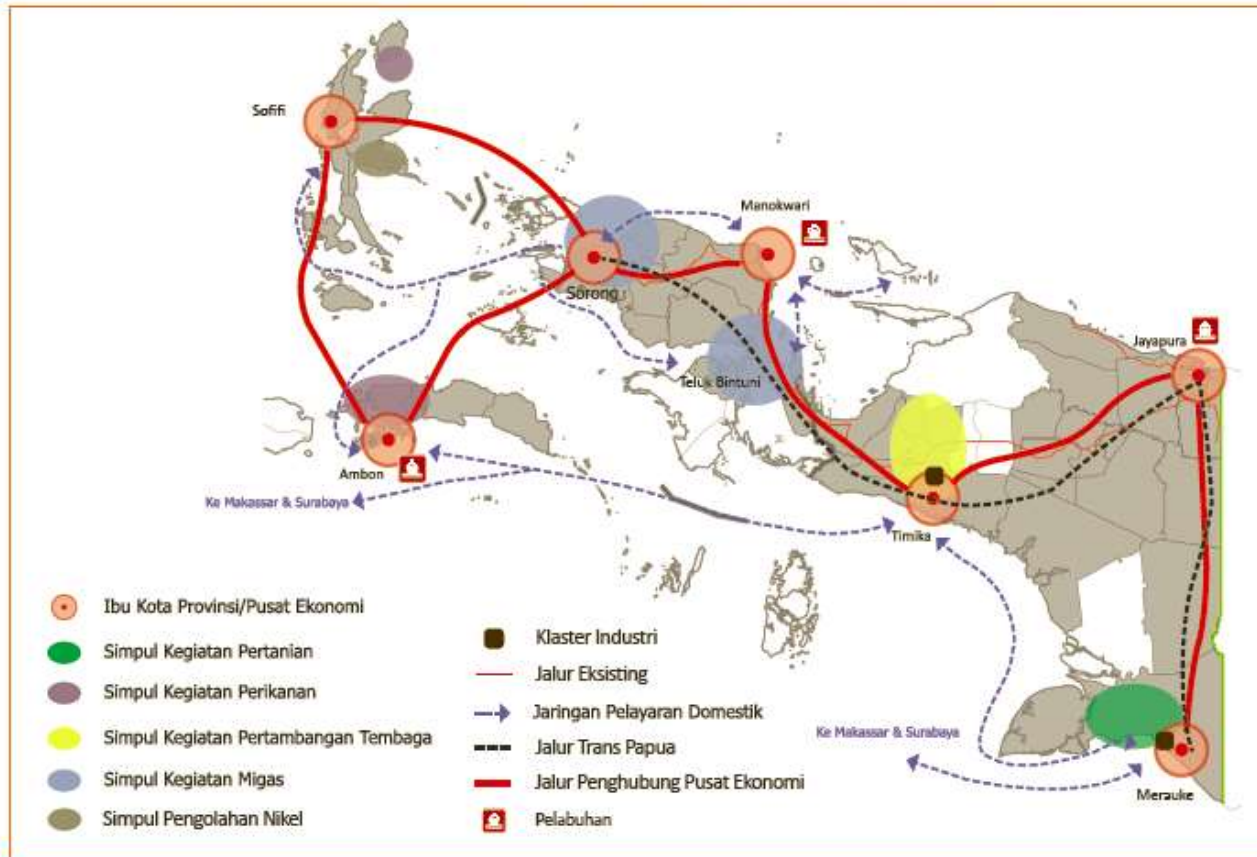
- Pertanian
- Industri Pertanian
- Penyuluh

KEGIATAN EKONOMI MINYAK GAS, NIKEL & TEMBAGA

- Perminyakan
- Pertambangan
- Geologi

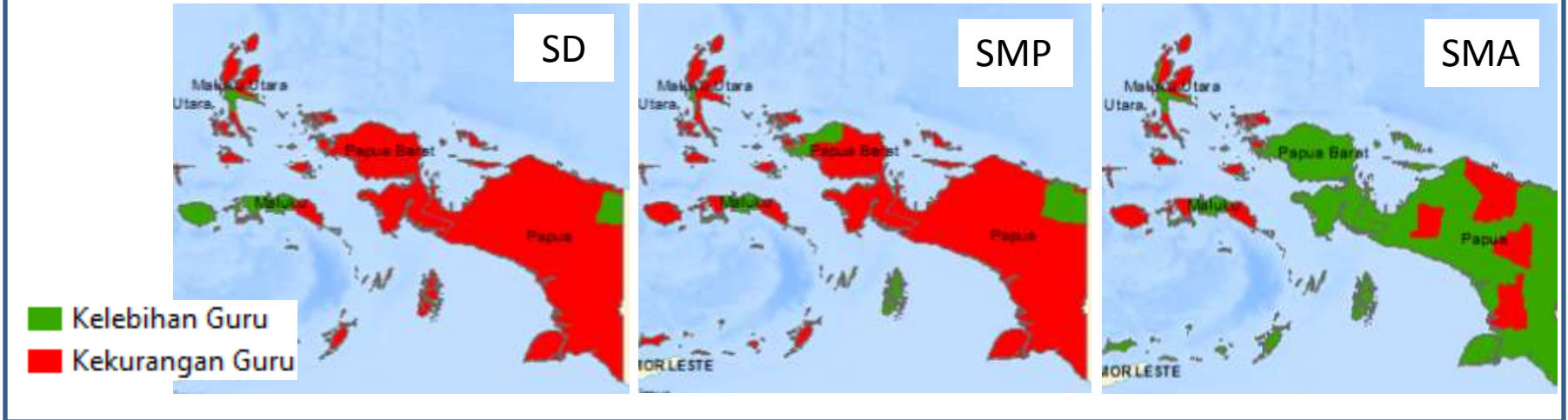
PENUNJANG

- Ekonomi
- Lingkungan
- Transportasi
- Perenc. Wilayah

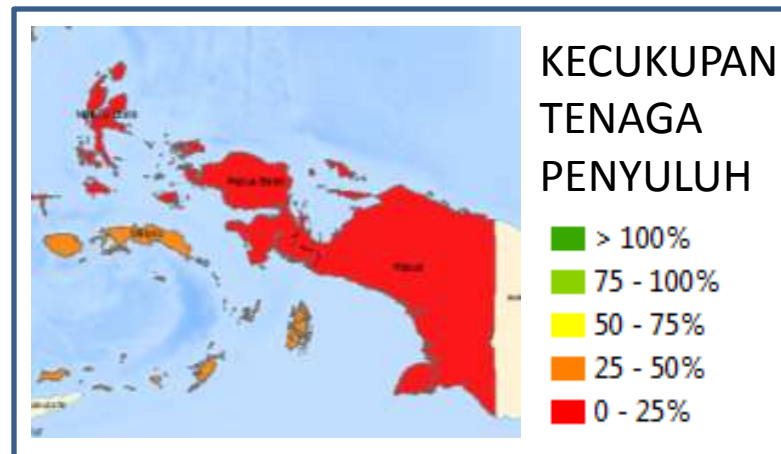
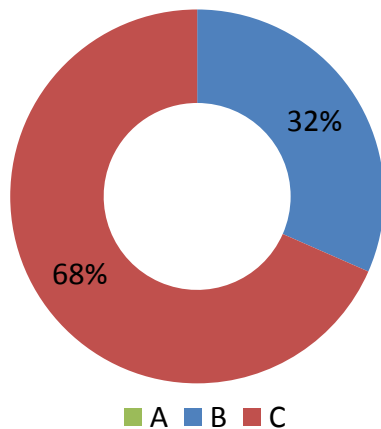


KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI PAPUA MALUKU

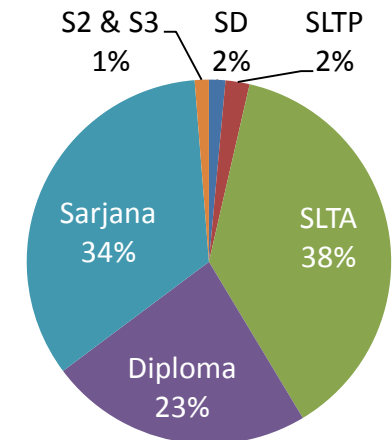
KETERSEDIAAN GURU



AKREDITASI BAN PT TAHUN 2013



PENDIDIKAN PEG. ASN

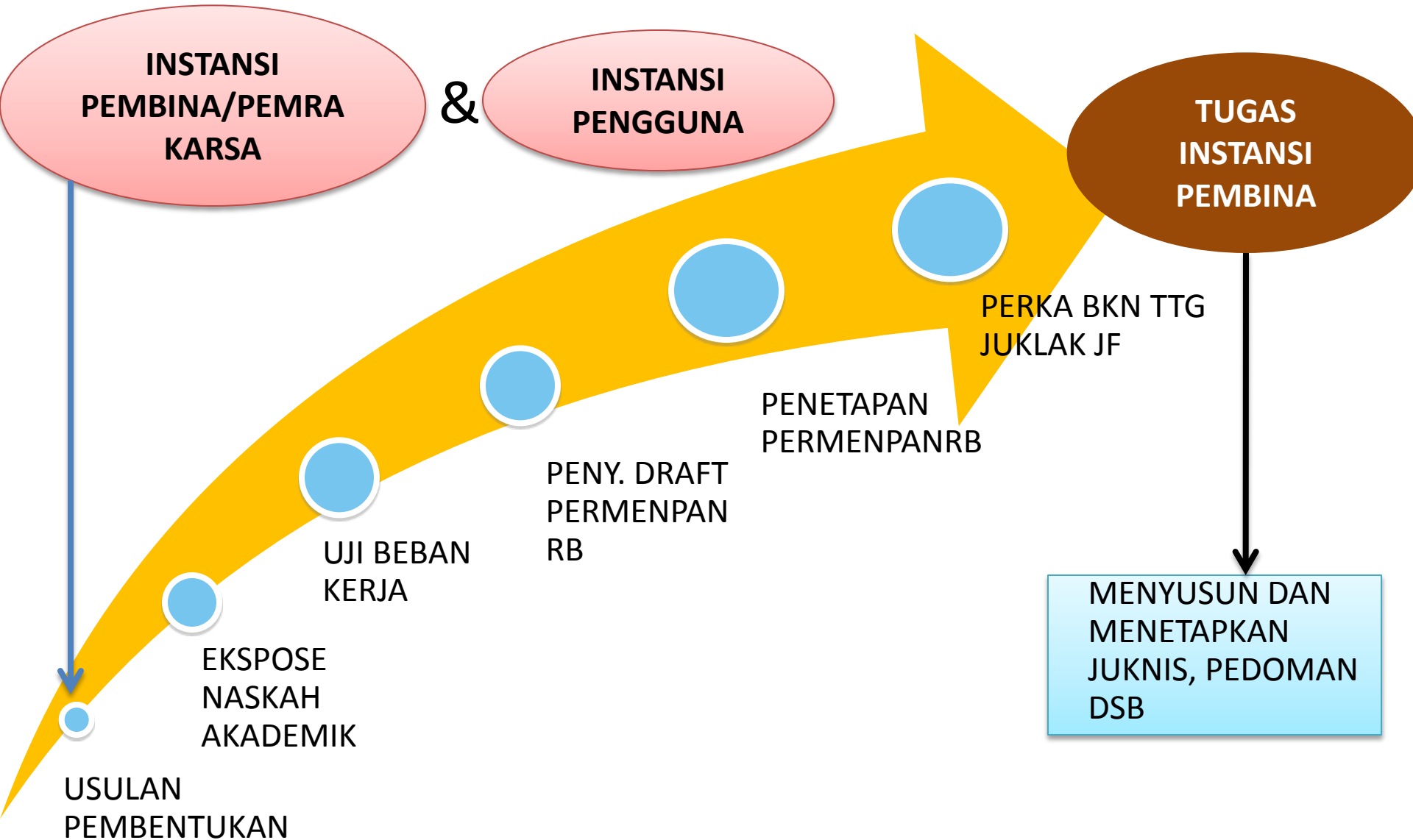


BEBERAPA JABATAN FUNGSIONAL SEJALAN DENGAN MP3EI 2015-2019

NO	JABATAN FUNGSIONAL
1	Inspektur Tambang
2	Inspektur Migas
3	Pengawas Benih Tanaman
4	Pengawas Bibit Ternak
5	Pegawas Mutu Hasil Pertanian
6	Surveyor Pemetaan
7	Penata Ruang
8	Pengendali Dampak Lingkungan
9	Pengawas Lingkungan Hidup
10	Pengawas Perikanan

NO	JABATAN FUNGSIONAL
11	Pengawas Farmasi dan Makanan
12	Perencana
13	Statistisi
14	Pemeriksa Merek / Paten/ Desain Industri
15	Penera
16	Penguji Mutu Barang
17	Analisis Kebijakan
18	Instruktur
19	Pamong Budaya
20	Auditor

PROSES USULAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL



POKOK-POKOK SUBSTANSI JABATAN FUNGSIONAL ASN

PROFESIONAL

PELAYANAN PRIMA,
INOVATIF,
KERJASAMA



1. NOMENKLATUR JABATAN
2. TUGAS POKOK
3. HASIL KERJA/OUTPUT KEGIATAN
4. URAIAN KEGIATAN/TUGAS
5. KOMPETENSI
6. JENJANG JABATAN
7. KUALIFIKASI PENDIDIKAN
8. PENGANGKATAN DALAM JABATAN
9. PENILAIAN PRESTASI KERJA
10. DIKLAT
11. UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
12. FORMASI JABATAN

TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN

JABATAN FUNGSIONAL ASN

TUGAS

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan tertentu

PERAN

Jabatan fungsional memiliki peran sebagai pelaksana tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu

KEDUDUKAN

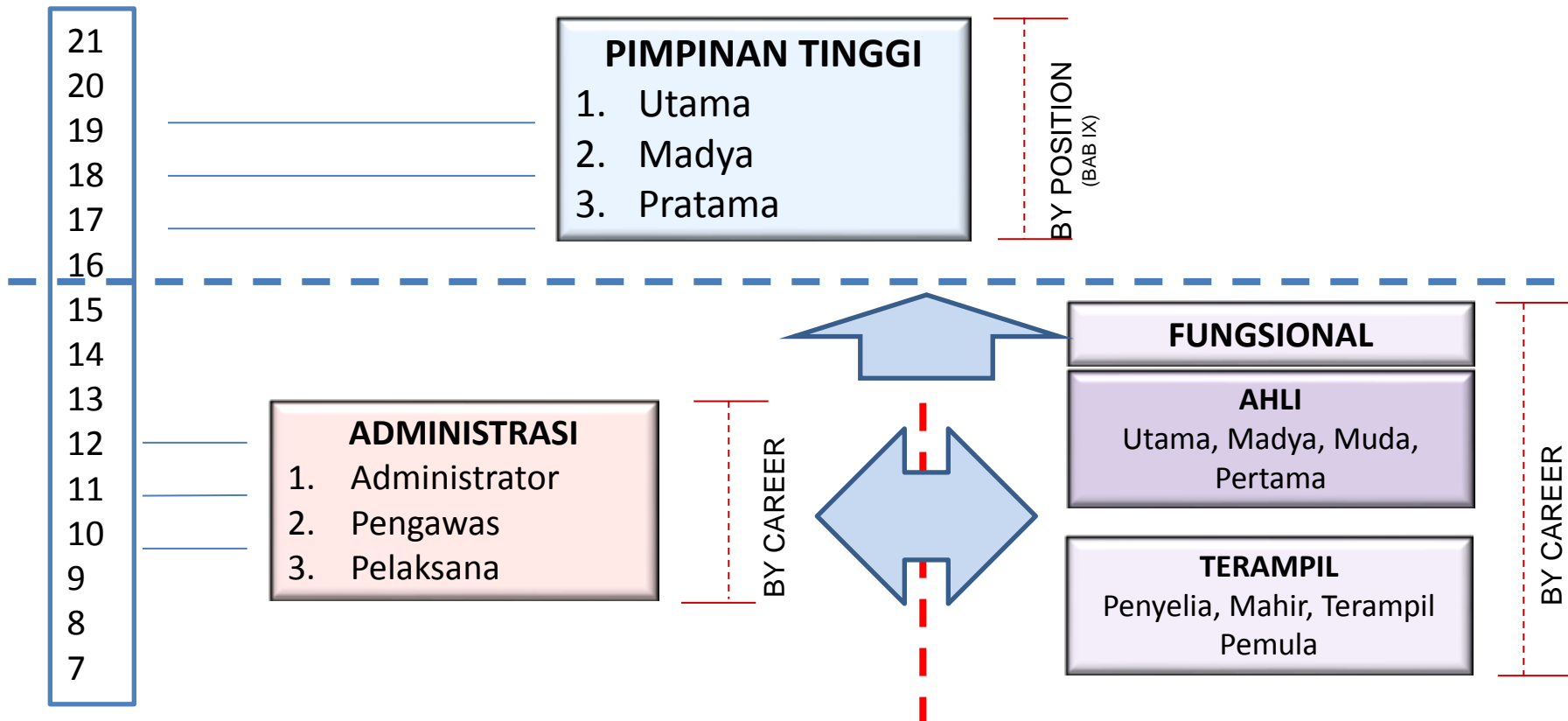
Jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu

KOMPETENSI & PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL

	KOMPETENSI	PERSYARATAN
Jabatan Fungsional Keahlian	<ol style="list-style-type: none">1. memiliki kemampuan pengetahuan di bidang tertentu2. memiliki kemampuan menggunakan metodologi3. memiliki kemampuan berfikir analitis dan konseptual4. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknik dan metoda dalam bidang tugas didasarkan pada keilmuan tertentu	<ol style="list-style-type: none">1. Profesional dengan pendidikan minimal Sarjana (strata –1) atau D.IV;2. Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengkajian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional yang bersangkutan;3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
Jabatan Fungsional Keterampilan	<ol style="list-style-type: none">1. memiliki pengetahuan vokasional/kejuruan2. mampu melaksanakan kegiatan teknis vokasional/kejuruan3. mampu menerapkan prosedur dan teknik vokasional/kejuruan tertentu	<ol style="list-style-type: none">1. Teknisi profesional dan/atau penunjang profesional dengan pendidikan minimal SLTA dan setinggi-tingginya Diploma III (D-3);2. Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan teknis operasional;3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

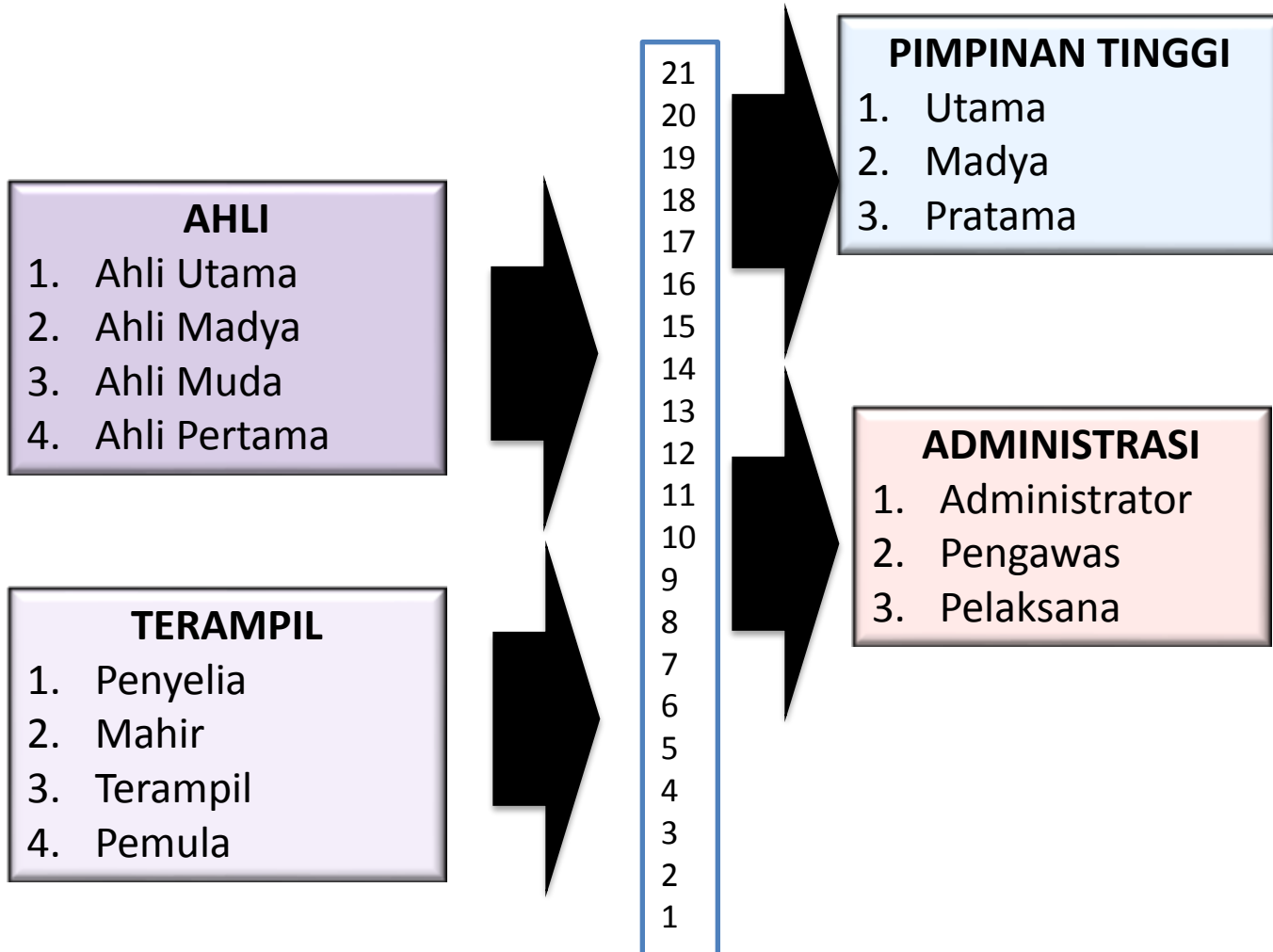
POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL ASN

PANGKAT
(KELAS JABATAN)



POLA KARIER JF

PANGKAT (KELAS JABATAN)



BY POSITION
(BAB IX)

BY CAREER

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEBAGAI HAK PEJABAT FUNGSIONAL ASN



**1. Pendidikan
dan Latihan**

2. Seminar

3. Kursus

4. Penataran

**5. Praktik Kerja
Di Instansi Pusat
dan Daerah
selama 1 tahun**

**6. Pertukaran
PNS dan
Swasta**

**INSTANSI PEMBINA WAJIB MENYUSUN RENCANA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM
RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI**

PENGANGKATAN DALAM JABATAN



1. PENGANGKATAN PERTAMA

PENDIDIKAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA,

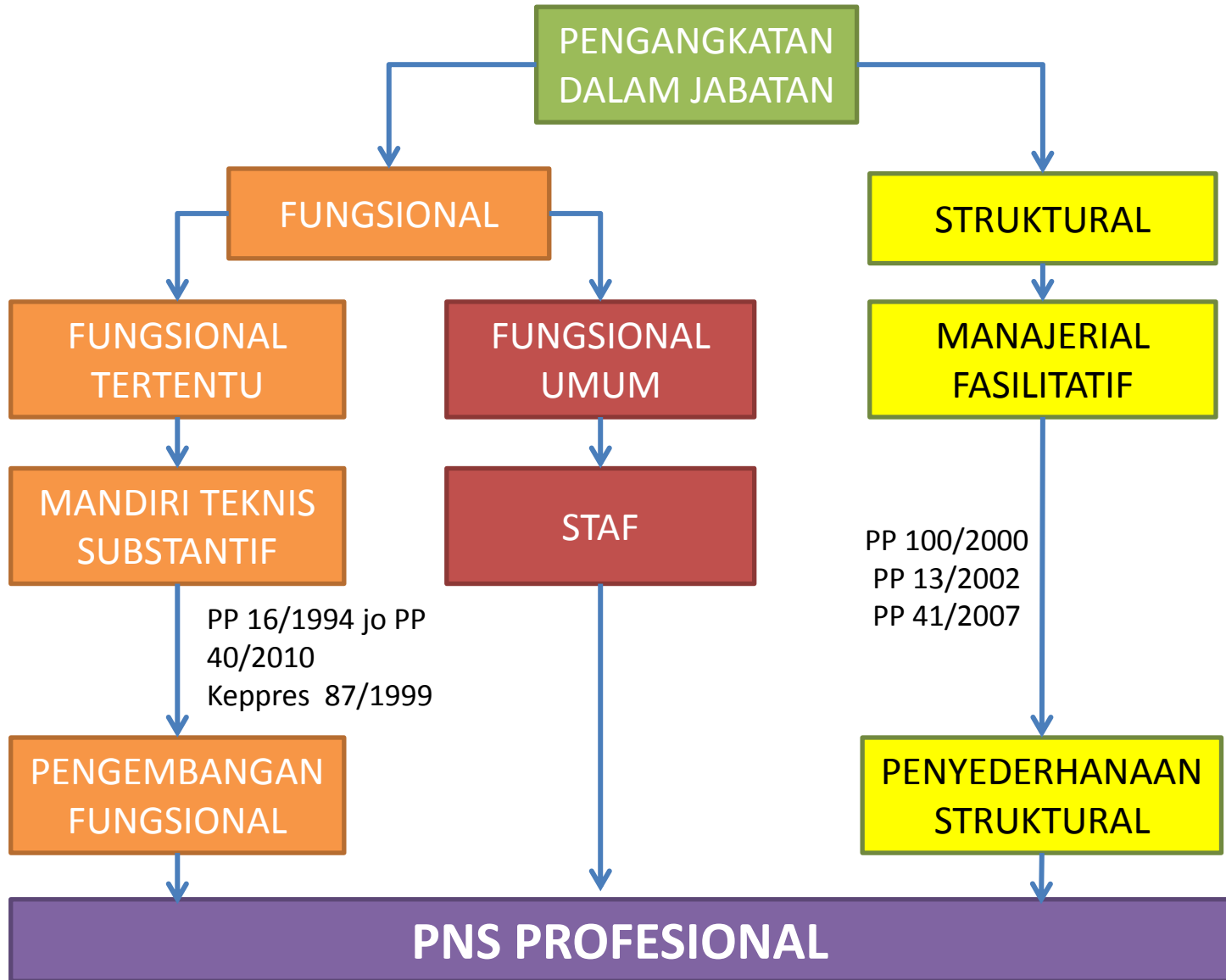
2. PENGANGKATAN DR JABATAN LAIN

PENDIDIKAN, PENGALAMAN, DIKLAT, PRESTASI
KERJA, USIA, UJI KOMPETENSI

3. PENYESUAIAN/INPASSING

TELAH DAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS DAN UJI
KOMPETENSI

KEBIJAKAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN



PENILAIAN PRESTASI KERJA

ANGKA
KREDIT
Vs
PP 46/2011



Penilaian kinerja pejabat fungsional dilakukan berdasarkan:

1. Pada tingkat individu yang merupakan jabatan dari rencana kinerja unit atau organisasi.
2. Target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku pejabat fungsional.

PERAN INSTANSI PEMBINA DAN INSTANSI PENGGUNA

Instansi Pembina (Pembinaan)

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan;
- b. menyusun pedoman formasi;
- c. menetapkan standar kompetensi;
- d. mengusulkan tunjangan jabatan;
- e. melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. menyusun kurikulum diklat fungsional/teknis fungsional;
- g. memfasilitasi diklat fungsional/teknis fungsional;
- h. mengembangkan sistem informasi jabatan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional;
- j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi;
- k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan;
- l. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai;
- m. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan
- n. melakukan monev Jabatan Fungsional;



Instansi Pengguna

- a. menyusun formasi jabatan untuk setiap jenjang
- b. melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional
- c. penyelenggaraan pembinaan.
 - memfasilitasi pelaksanaan tugas
 - melakukan penilaian prestasi kerja.
 - menyusun Manajemen Diklat
- d. berkoordinasi dengan instansi pembina Jabfung



PNS PROFESIONAL

HASIL SURAT MENPAN THN 2014
KAITAN DG IDENTIFIKASI JF DI
INSTANSI PEMBINA TEKNIS

INSTANSI PEMBINA YANG SUDAH MEMBERIKAN DATA JUMLAH DAN PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

(Surat MenpanRB Nomor B/071/M.PAN-RB/03/2014, tanggal 6 Maret 2014)

NO	INTANSI PEMBINA
1	KEM. HUKUM DAN HAM
2	KEM. PERTANIAN
3	KEM. KEHUTANAN
4	KEM. NAKERTRANS
5	KEM. PERHUBUNGAN
6	KEM. KELAUTAN DAN PERIKANAN
7	KEM. SEKRETARIAT NEGARA
8	BAPETEN
9	BPKP

NO	INTANSI PEMBINA
10	LAN
11	LEMSANEG
12	BIN
13	PERPUSNAS
14	BIG
15	BPOM
16	KEJAKSAAN AGUNG
17	LIPI
18	BPPT

INSTANSI PEMBINA YANG **BELUM** MEMBERIKAN DATA JUMLAH DAN PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL

(Surat MenpanRB Nomor B/071/M.PAN-RB/03/2014, tanggal 6 Maret 2014)

NO	INTANSI PEMBINA
1	KEM. DALAM NEGERI
2	KEM. LUAR NEGERI
3	KEM. PERDAGANGAN
4	KEM. PERINDUSTRIAN
5	KEM. PEKERJAAN UMUM
6	KEM. AGAMA
7	KEM. SOSIAL
8	KEM. KESEHATAN
9	KEM. KEUANGAN
10	KEM. KOMINFO
11	KEM. DIKBUD
12	KEM. LINGKUNGAN HIDUP

NO	INTANSI PEMBINA
13	KEM. ESDM
14	KEM. PERTAHANAN
15	BKKBN
16	ANRI
17	BPK
18	BMKG
19	BPS
20	BATAN
21	LKPP
22	BKN
23	BAPPENAS
24	BASARNAS

CONTOH KEBUTUHAN JFT

NO	JABATAN FUNGSIONAL	PERKIRAAN JML JF SAAT INI	ESTIMASI KEBUTUHAN SCR NASIONAL
1	SURVEYOR PEMETAAN	Ah: 5, Tr: 14	22.673
2	PENGAWAS PERIKANAN	Ah: 17, Tr:7	2.158
4	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Ah: 373, Tr: 140	3.870
5	POLISI KEHUTANAN	Ah: 333, Tr: 3790	18.581
6	PEREKAYASA	3884	7.650
7	PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	Ah: 315, Tr: 302	17.521
8	PERANCANG PERUNDANG UNDANGAN	358	5.035
9	PENGANTAR KERJA	Ah: 228, Tr: 165	5.832
10	PENERJEMAH	140	1.379



Deputi
SDM
APARATUR
Kemenpan RB

4

PENUTUP

Bonus Demografi Tidak Optimal

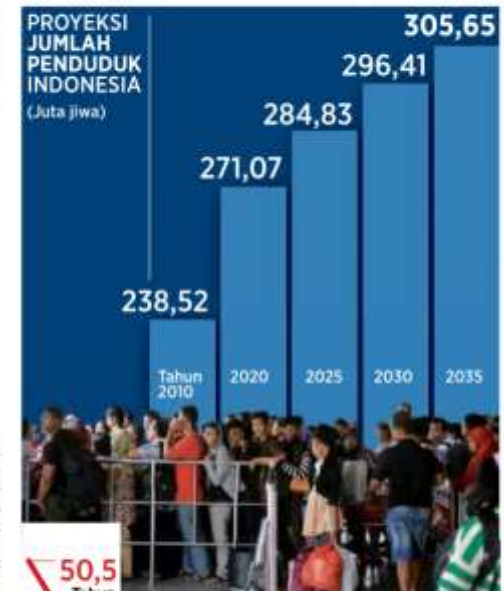
Tidak Produktif Dorong Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS – Indonesia diproyeksikan menikmati bonus demografi selama minimal 24 tahun, yakni tahun 2012-2035. Namun, sejauh ini, optimalisasinya minim. Jika isu kependudukan tak segera menjadi arus utama kebijakan, bukan tidak mungkin tren itu berlanjut dan akhirnya bonus demografi hanya lewat begitu saja.

Salah satu potret tentang isu demografi yang optimalisasinya minim ditemukan di wilayah terpadat penduduknya di Asia Tenggara, yaitu di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Tambora belum memadai. Hasil observasi yang dilakukan *Kompas*, Sabtu (1/3), menunjukkan tingkat pendidikan warga di wilayah itu maksimal hanya sampai sekolah menengah pertama.

Supriyadi, warga RT 013 RW 005, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, mengaku sebagai penganggur tanpa penghasilan tetap. Supriyadi hanya memperoleh penghasilan jika diminta menjadi kuli bangunan.



1. Sukseskan Pembangunan Nasional, dan
2. Manfaatkan Bonus Demografi (2010-2030) untuk peningkatan profesionalisme SDM Aparatur melalui Pengembangan Jabatan Fungsional



**Birokrat
Idaman**

**Bersih,
Berualitas,
Melayani.**



KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TERIMA KASIH

USULAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	PENGUSUL/ PEMRAKARSA	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS
1	Kementerian Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none">• Pelatih Olahraga	Proses Ekspose NA
		<ul style="list-style-type: none">• Tenaga Kepemudaan	Proses Penyusunan Naskah Akademik
2	Kementerian Pertahanan	Analisis Pertahanan Negara	Proses Penyusunan PermenpanRB
3	Kementerian Dalam Negeri	Pemberdaya Masyarakat	Proses Pembahasan Instansi Pembina
4	Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none">• Perencana Hukum	Proses Pembahasan Instansi Pembina
		<ul style="list-style-type: none">• Pembimbing Kemasyarakatan	Proses Penyusunan Naskah Akademik
5	Kementerian Perindustrian	Asesor Manajemen Mutu Industri	Proses Pembahasan Instansi Pembina

USULAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	PENGUSUL/ PEMRAKARSA	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS
6	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="749 354 1307 396">• Pengamat Tera	Pertek BKN
		<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="749 458 1307 501">• Pengawas Kemetrolgian	Pertek BKN
		<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="749 529 1307 622">• Pengelola Laboratorium Kemetrolgian	Pertek BKN
		<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="749 644 1307 736">• Pranata Laboratorium Kemetrolgian	Pertek BKN

USULAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	PENGUSUL/ PEMRAKARSA	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS
7	Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="749 311 1306 411">• Inspektur Angkutan Udara	Proses penyusunan/ Penyempurnaan Naskah Akademik
		<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="749 511 1306 554">• Inspektur Bandar Udara	Proses penyusunan/ Penyempurnaan Naskah Akademik
		<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="749 654 1306 753">• Inspektur Keamanan Penerbangan	Proses penyusunan/ Penyempurnaan Naskah Akademik
		<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="749 825 1306 925">• Inspektur Navigasi Penerbangan	Proses penyusunan/ Penyempurnaan Naskah Akademik
		<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="749 982 1306 1082">• Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara	Proses penyusunan/ Penyempurnaan Naskah Akademik
8	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Penguji K3	Proses Penyusunan PermenpanRB

USULAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS
9	Kementerian Komunikasi Informatika	<ul style="list-style-type: none">• Teknisi Siaran TV	Proses Penyusunan PermenpanRB
		<ul style="list-style-type: none">• Pranata Siaran TV	Proses Penyusunan PermenpanRB
		<ul style="list-style-type: none">• Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Proses Penyusunan PermenpanRB
		<ul style="list-style-type: none">• Pengendali Keamanan Informasi	Proses Pembahasan Internal (Naskah Akademik)
		<ul style="list-style-type: none">• Teknisi Siaran RRI	Proses Penyusunan Naskah Akademik
10	Set. DPR	<ul style="list-style-type: none">• Transkriptor	Proses Penyusunan PermenpanRB
		<ul style="list-style-type: none">• Analis APBN	Pertek BKN
11	Kementerian Pertanian	Analisis Ketahanan Pangan	Proses Penyusunan PermenpanRB

USULAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	PENGUSUL/ PEMRAKARSA	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 	Proses penyusunan PermenpanRB
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengendali Ekosistem Pesisir dan Laut 	Proses penyusunan PermenpanRB
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelola Kesehatan Ikan dan Lingkungan 	Proses penyusunan Naskah Akademik
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 	Proses ekspose Naskah Akademik
13	Mahkamah Agung	Pranata Peradilan	Proses usulan ke Menpan dan Pertek BKN
14	BATAN	Standardisator Nuklir	Proses ekspose Naskah Akademik
15	BAKORKAMLA	Penyuluh Keamanan Laut	Proses ekspose Naskah Akademik
		Analisis Keamanan Laut	Proses ekspose Naskah Akademik

USULAN JABATAN FUNGSIONAL

NO	PENGUSUL/ PEMRAKARSA	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS
16	Kementerian Perumahan Rakyat	Penyelenggara Perumahan Rakyat	Proses ekspose Naskah Akademik
17	BNN	Penyuluh Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Proses Penyusunan Naskah Akademik
18	Kementerian Keuangan	Pejabat Lelang	Proses Penyusunan Naskah Akademik
		Analisis Keuangan Daerah	Proses Penyusunan Naskah Akademik
19	Badan Informasi Geospasial	Analisis Informasi Geospasial	Proses Penyusunan Naskah Akademik

PROSES USULAN REVISI JABATAN FUNGSIONAL

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS
1	Kementerian Kesehatan	Perawat	Pertek BKN
		Perawat Gigi	Pertek BKN
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Pertek BKN
2	Kementerian Perdagangan	Penera	Pertek BKN
		Penguji Mutu Barang	Pertek BKN
3	Badan Informasi Geospasial (BIG)	Surveyor Pemetaan	Pembahasan dengan Instansi terkait
4	Kementerian Hukum dan HAM	Perancang PUU	Proses Usulan Draft PermenpanRB ke MenpanRB
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Guru	Proses Pembahasan Instansi

PROSES USULAN REVISI JABATAN FUNGSIONAL

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS
6	Arsip Nasional	Arsiparis	Proses penyusunan PermenpanRB
7	Kementerian Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none">• Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Proses penyusunan PermenpanRB
		<ul style="list-style-type: none">• Teknik Jalan dan Jembatan	Proses penyusunan PermenpanRB
		<ul style="list-style-type: none">• Teknik Penyehatan Lingkungan	Proses penyusunan PermenpanRB
		<ul style="list-style-type: none">• Teknik Pengairan	Proses penyusunan PermenpanRB
		<ul style="list-style-type: none">• Penata Ruang	Proses penyusunan PermenpanRB

PROSES USULAN REVISI JABATAN FUNGSIONAL

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS
8	Kementerian ESDM	<ul style="list-style-type: none">• Inspektur Tambang	Proses penyusunan PermenpanRB
		<ul style="list-style-type: none">• Inspektur Minyak dan Gas Bumi	Proses penyusunan PermenpanRB
		<ul style="list-style-type: none">• Inspektur Ketenagalistrikan	Proses penyusunan PermenpanRB
9	Lembaga Administrasi Negara	Widyaiswara	Pertek BKN
10	Kementerian Sekretariat Negara	Penerjemah	Proses Penyusunan PermenpanRB
11	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengawas Perikanan	Proses Sinkronisasi dg Usulan JF Baru

PROSES USULAN REVISI JABATAN FUNGSIONAL

NO	INSTANSI PEMBINA	JABATAN FUNGSIONAL	STATUS
12	Kementerian Lingkungan Hidup	Pengendali Dampak Lingkungan	Proses Pembahasan Instansi
13	Kementerian Tenaga Kerja dan dan Transmigrasi	Instruktur	Proses Pembahasan Instansi
14	Kementerian Keuangan	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	Proses Pembahasan Instansi

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

(Surat MenpanRB Nomor B/071/M.PAN-RB/03/2014, tanggal 6 Maret 2014)

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Penyuluh Hukum	0	0	0	0	4976	4976
2	Analisis Keimigrasian	0	0	0	0	227	227
3	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	358	5035	5393
4	Pemeriksa Paten	0	0	0	129	803	932
5	Pemeriksa Merek	4	0	4	68	813	881
6	Pemeriksa Keimigrasian	0	0	0	0	407	407

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Penyuluh Kehutanan	2155	14052	16207	1703	7728	9431
2	Polisi Kehutanan	3790	12623	16413	333	1835	2168
3	Pengendali Ekosistem Hutan	1120	4356	5476	1200	1956	3156

**PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
KEMENTERIAN PERTANIAN**

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Penyuluh Pertanian	16669	91512	108181	13068	71746	84814
2	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	3863	25299	29162	1410	9232	10642
3	Pengawas Benih Tanaman	834	5462	6296	795	5204	5999
4	Pengawas Bibit Ternak	196	1282	1478	306	2003	2309
5	Medik Veteriner	0	0	0	1312	8590	9902
6	Paramedik Veteriner	1131	7405	8536	0	0	0
7	Pengawas Mutu Pakan	139	911	1050	288	1890	2178
8	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	140	916	1056	373	2441	2814
9	Analisis Pasar Hasil Pertanian	78	512	590	132	865	997

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Pengantar Kerja	165	0	165	228	5832	6060

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Pengawas Radiasi	13	0	13	184	182	366

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Penguji Kendaraan Bermotor	201	2630	2831	0	0	0
2	Teknisi Penerbangan	716	830	1546	0	0	0
3	Pengawas Keselamatan Pelayaran	885	7565	8450	166	814	980

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan	7	1238	1245	17	920	937
2	Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	101	1615	1716	150	2164	2314
3	Pengawas Perikanan	82	258	340	117	3424	3541
4	Penyuluh Perikanan	1182	29156	30338	2346	26527	28873
5	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	422	4738	5160	505	4217	4722
6	Analisis Pasar Hasil Perikanan	0	33969	33969	0	23375	23375
7	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	422	4738	5160	505	4217	4722

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
LEMBAGA SANDI NEGARA

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Sandiman	193	2158	2351	207	1948	2155
2	Operator Transmisi Sandi	23	1117	1140	0	0	0

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Widyaiswara	0	0	0	4768	24909	29677
2	Analisis Kebijakan	0	0	0	0	3930	3930

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PERPUSTAKAAN NASIONAL

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Pustakawan	1248	274120	275368	1980	196793	198773

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN INTELJEN NEGARA

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Agen	92	777	869	623	1894	2517

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Surveyor Pemetaan	14	15481	15495	5	7192	7197

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Auditor	2760	12981	15741	8897	24334	33231

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Peneliti	0	0	0	8662	64849	73511

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Perekayasa	0	0	0	3384	7650	11034
2	Teknisi LITKAYASA	1730	1260	2990	0	0	0

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Pengawas Farmasi dan makanan	302	5552	5854	315	11667	11982

PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No	Jabatan Fungsional	Terampil			Ahli		
		Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Penerjemah	0	0	0	140	1379	1519

**PROYEKSI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
KEJAKSAAN AGUNG**

NO	Jabatan Fungsional	Saat Ini	Proyeksi (2015-2019)	Jumlah
1	Jaksa Utama	20		20
2	Jaksa Utama Madya	78		78
3	Jaksa Utama Muda	189		189
4	Jaksa Utama Pratama	589		589
5	Jaksa Madya	1331		1331
6	Jaksa Muda	2227		2227
7	Jaksa Pratama	1967		1967
8	Ajun Jaksa	1600		1600
9	Ajun Jaksa Madya	792		792
10	Calon Jaksa	450	2250	2700